LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT BPR GUNUNG SLAMET TAHUN 2022

Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
TELEPON: 0282532871

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola yang baik sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dan keberlanjutan bagi PT BPR Gunung Slamet serta untuk memenuhi kewajiban Bank dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.. Untuk itu PT BPR Gunung Slamet terus berusaha memperkuat pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu mencakup 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transaparansi (Transparency).
2. Akuntabilitas (Accountability).
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (Fairness)

Penilaian Tata Kelola dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan – laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya, penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko. Tujuan penerapan tata kelola yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR seiiring dengan visi, misi dan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan, menjaga agar kegiatan operasional selalu patuh terhadap peraturan yang berlaku, meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan meningkatkan budaya kerja bank dalam mematuhi setiap peraturan yang berlaku

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Irawan Jayasaputra
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Bertugas mewakili Bank baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dgn Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 1 & 2 2) Membuat RBB bersama Direksi lainnya & Komisaris setiap tahun 3) Memimpin bank sesuai dgn ketentuan-ketentuan yg telah digariskan oleh Pemerintah/BI/OJK serta memberiakn laporan sesuai ketentuan yang berlaku 4) Menggalang kerjasama yang baik dengan nasabah, deposan, penabung, pemda, masyarakat, instansi-instansi & organisasi lainnya 5) Melaksanakan RBB yg telah disusun & apabila ada perubahan meminta persetujuan Komisaris 6) Selalu menjaga rasio bank dalam likuiditas, solvabilitas & rentabilitas yg baik serta menjadikan bank yg sehat 7) Mengangkat, memberhentikan & memutasikan pegawai sesuai dgn ketentuan bank 8) Memutus kredit sesuai dgn ketentuan yg berlaku 9) Dalam hal meminjam uang, menjual barang/membeli barang harus mendapat persetujuan dari Komisaris 10) Meningkatkan pengembangan SDM & kesejahteraan karyawan sesuai dgn kemampuan bank 11) Memantau perkembangan kredit, DPK, aset, profit & menekan serendah mungkin NPL 12) Mengembangkan bank baik aset, kredit, dana maupun laba rugi abik volume rupiaih maupun jumlah nasabah 13) Rapat koordinasi dengan PSP apabila ada masalah-masalah yg dihadapi		
2.	Nama	:	Kukuh Dwi Prasetio
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Bersama dgn jajaran Direksi menetapkan strategi-strategi untuk mencapai Visi & Misi bank & mengelola Bank agar dpt tumbuh serta berkembang menjadi Bank yg sehat, kuat menghadapi persaingan & terpercaya di masyarakat dgn menepati kewajiban membayar kembali hak-hak masyarakat berupa tabungan, deposito, hutang & kewajiban lain 2) Wajib menindaklanjuti temuan audit intern/ ekstern BPR, hasil pengawasan Dekom & OJK, mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham & RUPS 3) Dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga/pihak lain yg dpt merugikan Bank 4) Bersama dgn bagian terkait mengembangkan produk-produk Bank 5) Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir & membantu tugas-tugas Direktur Utama 6) Merencanakan, menyusun, melaksanakan & mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan operasional Bank		

7) Membuat SOP Bank mengenai semua proses operasional, produk- produk & ketentuan-ketentuan baru
8) Membuat strategi dlm pemenuhan target Bank dgn cara bagaimana mencapai target tersebut
9) Mengecek & mengawasi semua kegiatan operasional Bank
10) Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yg dilakukan sesuai dgn SOP Bank
11) Bertanggungjawab pd pengembangan kualitas SDM & produk-produk bank, membuat laporan kegiatan untuk diberikan kpd Direktur utama
12) Menyampaikan laporan-laporan kepada Pemegang Saham & menetapkan kebijakan-kebijakan Bank
13) Memimpin seluruh karyawan dlm menjalankan bisnis bank
14) Melaporkan secara berkala & tertulis kepada Dewan Komisaris/Direktur Utama perkembangan kredit/ dana serta mengadakan Rapat Koordinasi dgn Pengurus & PSP untk mengambil langkah-langkah perbaikan kedepan
15) Melakukan peninjauan/ pengontrolan terhadap nasabah kredit & melakukan penagihan-penagihan bersama petugas kredit
16) Bersama dengan jajaran kredit menekan serendah mungkin tunggakan, NPL serta jajaran Direksi menjaga TKS
17) Bertanggungjawab atas kerugian perusahaan yg disebabkan karena Direktur tdk menjalankan kepengurusan perusahaan

3.	Nama	:	Dwi Aribowo
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab :

1) Bersama dengan jajaran Direksi lain mengelola bank agar dpt tumbuh, berkembang menjadi bank yg sehat, kuat menghadapi persaingan & terpercaya dimasyarakat dgn menepati kewajiban-kewajiban membayar kembali hak-hak masyarakat
2) Bertanggungjawab terhadap fungsi Kepatuhan pd BPR & membuat laporan ttg pokok-pokok pelaksanaan tugas kepatuhan
3) Melaporkan hasil penilaian & evaluasi terhadap tingkat kepatuhan Bank kpd Direktur Utama & Dekom sesuai dgn kebutuhan Bank
4) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
5) Mengusulkan kebijakan kepatuhan/prinsip-prinsip kepatuhan yg akan ditetapkan oleh Direksi
6) Membuat rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan Bank secara berkala
7) Memberikan saran & masukan kpd Direktur Utama atas hasil penilaian & evaluasi tingkat kepatuhan Bank serta meminimalkan risiko Kepatuhan Bank
8) Melakukan tugas-tugas lainnya yg terkait dgn fungsi kepatuhan & wajib menindaklanjuti temuan audit intern/ekstern BPR hasil pengawasan Dewan Komisaris & OJK
9) Wajib membentuk SKMR, Komite Managemen Risiko, & SKK
10) Menyusun SOP penerapan Manrisk secara tertulis serta mengembangkan budaya manrisk pada seluruh jajaran organisasi
11) Mengevaluasi & memutuskan transaksi yg memerlukan persetujuan Direksi
12) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang masih terkait dengan Manrisk
13) Memastikan bahwa fungsi manrisk telah beroperasi secara independen.
14) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manrisk & eksposur risiko yang dilakukan BPR secara keseluruhan.
15) Wajib menyusun kebijakan pengawasan & prosedur pengelolaan & mitigasi risiko TPPU, APU & PPT
16) Sebagai penanggungjawab penerapan program APU & PPT baik di kantor Pusat maupun kantor cabang
17) Memastikan bahwa aktivitas Bank telah dilaksanakan dg mematuhi peraturan perundangundangan, perjanjian & komitmen dengan OJK serta peraturan & kebijakan internal yg berlaku

	18) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG secara berkala 20) Bersama-sama dgn Direksi lain menjaga TKS

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
1. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik agar menambah kepercayaan nasabah. 2. Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. 3. Meningkat fungsi pengawasan disemua lini organisasi yang dilakukan oleh SKAI & seluruh jajaran Pengurus terhadap operasional bank khususnya kredit/dana. 4. Penanganan kredit bermasalah difokuskan pada potensi debitur untuk penyelesaian kredit bermasalah, sehingga setiap tindakan membawa hasil & membentuk tim yang kuat untuk menangani penyelesaian kredit bermasalah 5. Agar dilakukan stress test & analisa ulang terhadap debitur-debitur yang telah direlaksasi. 6. Direksi telah menyempurnakan SOP Kredit, update POJK terbaru serta ketentuan internal (SK, SE, MEMO dan lainnya) & disosialisasikan keseluruh jajaran manajemen. 7. Telah diangkat PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada tahun 2021.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Sentot Sujiono
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurusan bank & memberikan nasehat kpd Direksi 2) Wajib melaksanakan prinsip kehati- hatian & bertanggungjawab dlm menjalankan tugas pengawasan & pemberian nasehat kpd Direksi untuk kepentingan BPR 3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan selama tahun buku yg lampau kpd RUPS 4) Setiap waktu dlm jam kerja kantor berhak memasuki bangunan & halaman serta berhak memeriksa uang kas dll, mengetahui segala tindakan yg dijalankan Direksi 5) BPR meminjam uang ke pihak lain harus dengan persetujuan komisaris utama 6) Menyetujui & mengevaluasi kebijakan manrisk serta memastikan penerapan manrisk oleh Direksi 7) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan manrisk 8) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan manrisk 9) Mengevaluasi & memutuskan permohonan Direksi yg berkaitan dg transaksi yg memerlukan persetujuan Dekom 10) Wajib melaksanakan tugas & tanggungjawab secara independen 11) Melakukan pengawasan aktif dlm hal APU & PPT 12) Wajib menyelenggarakan rapat 1 kali dalam 3 bulan dgn agenda RBB, isu strategis, evaluasi/ penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi RBB, penetapan RBB 1 tahun sekali 13) Memimpin bank apabila Direktur Utama & Direksi berhalangan/tidak ada 14) Memberhentikan sementara waktu jika Direksi bertindak bertentangan dg Anggaran Dasar & peraturan perundangan yg berlaku 15) Melakukan pengawasan & OTS terhadap nasabah kredit/dana 16) Membuat laporan kepada OJK setiap 6 bulan sekali perkembangan jalannya BPR 17) Melakukan kunjungan kpd nasabah macet dgn mengevaluasi & menentukan langkah-langkah selanjutnya		

2.	Nama	:	Bambang Wijanarko
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Membantu Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam managemen Bank serta memberikan nasehat demi kemajuan dan keamanan Bank. 2) Memimpin Bank apabila Direksi & Komisaris Utama berhalangan hadir. 3) Mengawasi kegiatan Bank serta mengontrol Realisasi & Rencana Anggaran. 4) Melakukan Pengawasan serta pengontrolan Kredit & DPK kemudian melaporkan ke Komisaris Utama. 5) Bersama Direktur Utama & Komisaris Utama menyusun Rencana Kerja. 6) Melakukan rapat komisaris setiap triwulan bersama Direksi & Staf menindaklanjuti hasil rapat gabungan group. 7) Mempresentasikan hasil pengawasan ke OJK. 8) Membantu Komisaris Utama dalam melapor ke OJK setiap 6 bulan. 9) Dalam melakukan seluruh tugas-tugas sebagai komisaris independen tidak boleh terpengaruh oleh siapapun sehingga benar-benar independen		
3.	Nama	:	Mujijat
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Membantu Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam manajemen Bank serta memberikan nasehat demi kemajuan & keamanan Bank. 2) Memimpin Bank apabila Direksi & Komisaris Utama berhalangan. 3) Mengawasi kegiatan Bank serta mengontrol Realisasi & Rencana Anggaran. 4) Melakukan pengawasan & pengontrolan Kredit & DPK serta melaporkan ke Komisaris Utama & Direksi. 5) Bersama Direksi & Komisaris lainnya menyusun RBB Bank. 6) Mempresentasikan hasil pengawasan di OJK apabila diminta. 7) Membantu Komisaris Utama dalam membuat laporan ke OJK setiap 6 bulan. 8) Wajib memastikan penerapan GCG (TARIF) pada setiap kegiatan usaha dari seluruh struktur organisasi dari atas sampai ke bawah. 9) Komisaris wajib memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern/ ekstern hasil pengawasan Dewan Komisaris & OJK. 10) Wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang- undangan dibidang keuangan & perbankan atau keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha yg dilakukan karyawan kepada Direksi. 11) Membentuk Komite Audit, Pemantauan Risiko & Komite Remunerasi dan Nominasi. 12) Rapat Kerja Dewan Komisaris paling sedikit 4 kali dalam satu tahun & agendanya rencana bisnis BPR, isu-isu strategis BPR, evaluasi kebijaksanaan strategis & evaluasi rencana kerja. 13) Dilarang menggunakan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain, yang dapat merugikan Bank. 14) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Bank. 15) Menyetujui, mengevaluasi, memastikan penerapan managemen risiko oleh Direksi. 16) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi terhadap pelaksanaan APU dan PPT.		

Rekomendasi Kepada Direksi :
1. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik agar menambah kepercayaan nasabah. 2. Agar lebih berhati-hati dalam pemberian kredit, fokus pada pemberian kredit kepada debitur eksisting yang sudah terbukti lancar dengan menawarkan top up & instansi- instansi yang sudah melakukan kerjasama dengan Bank Gunung Slamet.

3. Meningkat fungsi pengawasan disemua lini organisasi yang dilakukan oleh SKAI & seluruh jajaran Pengurus terhadap operasional bank khususnya kredit/dana. 4. Penanganan kredit bermasalah difokuskan pada potensi debitur untuk penyelesaian kredit bermasalah, sehingga setiap tindakan membawa hasil & membentuk tim yang kuat untuk menangani penyelesaian kredit bermasalah 5. Agar dilakukan stress test & analisa ulang terhadap debitur-debitur yang telah direlaksasi. 6. Menyempurnakan aplikasi IBS khususnya perhitungan bunga untuk kredit restrukturisasi. 7. Penyempurnaan SOP Kredit, update POJK terbaru serta ketentuan internal (SK, SE, MEMO dan lainnya) & disosialisasikan keseluruh jajaran manajemen. 8. Lebih aktif dalam penggalian dana murah (tabungan). 9. Kerjasama dengan Bank Umum terus dilaksanakan dalam rangka untuk pinjaman kredit linkage program untuk membantu penyediaan dana dalam rangka penyaluran kredit pada suatu saat diperlukan. 10. Pelaksanaan operasional yang sudah baik terus dapat dipertahankan & ditingkatkan. 11. Jajaran kredit agar lebih berhati-hati lagi dalam memutus kredit mengingat kondisi pandemic yang masih belum berakhir meningkatnya kredit bermasalah. 12. Agar lebih tanggap terhadap early warning signal yang tercermin dari kondisi bisnis nasabah, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal & segera mengambil tindakan penyelamatan dengan solusi yang tepat & terbaik dari pilihan alternatif yg ada.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Dalam hal menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Kehadiran di kantor BPR dilakukan setiap hari. 2. Menyelenggarakan rapat dewan komisaris minimal 4 kali dalam 1 tahun (triwulan). 3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tindakan langsung dengan memeriksa berkas-berkas yang ada. 4. Menyetujui pembuatan Pedoman & Kebijakan yang bermanfaat bagi operasional BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern. b) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan public dengan standar audit. c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR. d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan public, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lain. e) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :

	a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Bambang Wijanarko	Keuangan dan Perbankan	Ketua (Komite Audit) Ketua (Komite Pemantau Resiko)	Iya
2.	A. Umbu Tellu	Hukum	Anggota (Komite Audit)	Iya
3.	Agung Sungko Wardoyo	Manajemen Risiko dan Keuangan	Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
4.	Teguh Imam Sujudy	Akuntansi dan Keuangan	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	:	Nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	1) Mereview dan mengevaluasi rencana kerja & pelaksanaannya Komite Audit per semester. 2) Memberikan rekomendasi atas penunjukan AP & KAP pada RUPS tahunan kepada Dewan Komisaris. 3) Mereview & mengevaluasi rencana & pelaksanaan tugas SKAI tahunan. 4) Melakukan rapat intern Komite Audit atas permasalahan & isu-isu yang bisa merugikan bank. 5) Melakukan rapat dengan Divisi Kepatuhan /

			lainnya atas hasil temuan SKAI. 6) Laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan. 7) Meminta masukan satuan kerja lain & Kacab serta on the spot atas pelaksanaan kerja SKAI. 8) Melakukan rapat dgn Direktur Operasional & Direktur Kepatuhan terhadap produk bank yang dipandang perlu mendapat perhatian khusus.
	Realisasi	:	1) Mereview dan mengevaluasi rencana kerja & pelaksanaannya Komite Audit semester I tahun 2022. 2) Memberikan rekomendasi atas penunjukan AP & KAP pada RUPS tahunan kepada Dewan Komisaris. 3) Mereview & mengevaluasi rencana & pelaksanaan tugas SKAI tahunan. 4) Melakukan rapat intern Komite Audit atas permasalahan & isu-isu yang bisa merugikan bank. 5) Laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan. 6) Melakukan rapat dengan Divisi Kepatuhan / lainnya atas hasil temuan SKAI.
	Jumlah Rapat	:	4
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	1) Mengadakan rapat dengan Bagian Manajemen Risiko secara berkala dan sewaktu- waktu dapat mengadakan rapat sesuai kebutuhan, untuk membahas laporan yang dibuat oleh Bagian Manajemen Risiko kepada pihak manajemen dan OJK yang meliputi : - Laporan Profl Risiko Bank - Laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKS) - Laporan Tata Kelola (GCG) - Topik lain yang dipandang penting sesuai dengan kondisi terkini 2) Komite Pemantau Risiko melakukan rapat dengan Direktur Kepatuhan untuk membahas Laporan Kepatuhan Bulanan dan/ atau topik lain yang dipandang penting sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Bank. 3) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. 4) Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas

			berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian Direksi, dan juga akan memantau tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Direksi.
	Realisasi	:	Program kerja Komite Pemantau Risiko belum sepenuhnya terealisasi karena masih terjadi perangkapan jabatan antara Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sehingga masih ada tumpang tindih jobdesk dan belum berjalan sepenuhnya.
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR hanya memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Untuk Komite Pemantau Risiko belum berjalan sepenuhnya.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Irawan Jayasaputra	Rp204.000.000,00	1.02%
2.	Kukuh Dwi Prasetio	Rp0,00	0%
3.	Dwi Aribowo	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak terjadi perubahan kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR di tahun 2022.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Irawan Jayasaputra	600619	PT. BPR Gunung Simping Artha	4.9%
2.	Irawan Jayasaputra	600621	PT. BPR Citanduy Artha	4.2%
3.	Irawan Jayasaputra	620146	PT BPRS Gunung Slamet	6.5%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terjadi perubahan kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lain selama tahun 2022.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Irawan Jayasaputra	Tidak ada	Tidak ada	Mudjadi Djajadinata - Orang tua, Palupi Nuraeni Mudjadi - Kakak Kandung, Bagas Waskito Kuncoro - Kakak Kandung, Fitri Parliyanti - Kakak Kandung
2.	Kukuh Dwi Prasetio	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Dwi Aribowo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada perubahan terkait hubungan keuangan anggota direksi pada BPR selama tahun 2022.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Irawan Jayasaputra	Tidak ada	Tidak ada	Mudjadi Djajadinata - Orang Tua, Palupi Nuraeni Mudjadi - Kakak Kandung, Bagas Waskito Kuncoro - Kakak Kandung, Fitri Parliyanti - Kakak Kandung
2.	Kukuh Dwi Prasetio	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Dwi Aribowo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada perubahan terkait hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR selama tahun 2022.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sentot Sujiono	Rp0,00	0%
2.	Bambang Wijanarko	Rp0,00	0%
3.	Mujijat	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT BPR Gunung Slamet.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sentot Sujiono	-	-	0%
2.	Bambang Wijanarko	-	-	0%
3.	Mujijat	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sentot Sujiono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Wijanarko	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Mujijat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sentot Sujiono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Wijanarko	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Mujijat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp468.093.000,00	3	Rp299.970.000,00
2.	Tunjangan	3	Rp111.000.000,00	3	Rp52.500.000,00
3.	Tantiem	3	Rp410.325.000,00	3	Rp246.175.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp989.418.000,00		Rp598.645.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasarkan RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah Dinas (3)	Rumah Dinas (2)
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3)	BPJS Kesehatan (3)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.8 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.6 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.8 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	11 Januari 2022	3	1. Rencana Bisnis Tahun 2022 2. Isue - isue strategis 3. Evaluasi / penetapan kebijakan strategis 4. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR
2.	05 April 2022	3	1. Rencana Bisnis Triwulan I tahun 2022 2. Isue - isue strategis 3. Evaluasi / penetapan kebijakan strategis 4. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR
3.	05 Juli 2022	3	1. Rencana Bisnis Triwulan II tahun 2022 2. Isue - isue strategis 3. Evaluasi / penetapan kebijakan strategis 4. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR
4.	05 Oktober 2022	3	1. Rencana Bisnis Triwulan III tahun 2022 2. Isue - isue strategis 3. Evaluasi / penetapan kebijakan strategis 4. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara berkala (Triwulan) dalam setahun.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Sentot Sujiono	4	0	100%
2.	Bambang Wijanarko	4	0	100%
3.	Mujijat	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris selalu hadir dalam setiap rapat Dewan Komisaris selama setahun (Triwulan)				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2022 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Anggota Pegawai Tidak Tetap dan Anggota Pegawai Tetap.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi selama periode tahun 2022		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Irawan Jayasaputra	Direktur Utama	Irawan Jayasaputra	Direktur Utama	Pembelian Mobil Inventaris Kantor	130 juta rupiah	Pembelian Mobil Toyota Rush tahun 2012 atas nama Irawan Jayasaputra
2.	Mudjadi Djajadinata	PSP	Irawan Jayasaputra	Direktur Utama	Pembelian Mobil Inventaris Kantor	200 juta rupiah	Pembelian Mobil Toyota Fortuner tahun 2009 atas nama Mudjadi Djajadinata
3.	Nanik Sri Sugijanti	Istri PSP	Irawan Jayasaputra	Direktur Utama	Pembelian Mobil Inventaris Kantor	120 juta rupiah	Pembelian Mobil Suzuki Katana tahun 2004 atas nama Nanik Sri Sugijanti
4.	Mudjadi Djajadinata	PSP	Irawan Jayasaputra	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor	726 juta rupiah	Sewa menyewa gedung kantor PT BPR Gunung Slamet

							kepada kepemilik tanah & bangunan atas nama Mudjadi Djajadinata selaku PSP
5.	Mudjadi Djajadinata	PSP	Irawan Jayasaputra	Direktur Utama	Renovasi kantor	267 juta rupiah	Renovasi gedung tambahan untuk ruangan SKAI, pemanggilan debitur bermasalah, dapur, parkir karyawan, & kantin
6.	Irawan Jayasaputra	Direktur Utama	Irawan Jayasaputra	Direktur Utama	Renovasi bangunan lainnya	71 juta rupiah	Biaya renovasi bangunan garasi yg beralamat di Jl. Duku milik atas nama Irawan Jayasaputra selaku Direktur Utama yg disewakan kepada Bank untuk tempat parkir kendaraan sitaan. Biaya renovasi sebesar Rp 71.472.400,-

Penjelasan Lebih Lanjut :

Terdapat 6 hal pengambilan suatu keputusan oleh anggota Direksi yang mengandung benturan kepentingan

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	19 Januari 2022	Sosial	Bantuan Milad SMP Muhammadiyah Purwojati ke 37 tahun	SMP Muhammadiyah Purwojati	Rp300.000,00
2.	28 Januari 2022	Sosial	Partisipasi dalam rangka himbauan KAMTIBNAS	KAMTIBNAS Polres Cilacap	Rp2.500.000,00
3.	04 Februari 2022	Sosial	Bantuan Kompor gas	Korban Kebakaran Pasar Kroya	Rp1.020.000,00
4.	05 Februari 2022	Sosial	Bantuan pembinaan prestasi	MIN 1 Cilacap	Rp750.000,00
5.	10 Februari 2022	Sosial	Bantuan sepeda untuk acara ulang tahun	MTS Maarif NU 1 Jatilawang	Rp1.150.000,00
6.	18 Februari 2022	Sosial	Bantuan HUT SMP N 4 Cilacap	SMP N 4 Cilacap	Rp1.000.000,00
7.	22 Februari 2022	Sosial	Partisipasi tumpeng untuk acara hari jadi Banyumas ke 451	Dinas Kecamatan Ajibarang	Rp450.000,00
8.	22 Februari 2022	Sosial	Bantuan semen 10 sak untuk pembangunan masjid	SMP Muhammadiyah Ajibarang	Rp580.000,00
9.	25 Februari 2022	Sosial	Bantuan & dukungan	Sargal Batalyon 405 Surya Kusuma	Rp1.000.000,00
10.	26 Februari 2022	Sosial	Suport kegiatan	Polres Purworejo	Rp450.000,00
11.	01 Maret 2022	Sosial	Partisipasi untuk acara HUT ke 38 tahun	SMP N 1 Pekuncen	Rp700.000,00
12.	21 Maret 2022	Sosial	Partisipasi tumpeng untuk acara HUT Cilacap ke 166 th	Kecamatan Nusawungu	Rp300.000,00
13.	23 Maret 2022	Sosial	Bantuan 10 dus mie instan & 10 kg telur	Korban banjir Nusawungu	Rp1.215.000,00
14.	24 Maret 2022	Sosial	Partisipasi untuk acara Harlah ie 54 th	MTS Maarif NU 1 Pekuncen	Rp500.000,00
15.	31 Maret 2022	Sosial	Partisipasi semen 50 sak	Rutan Banyumas	Rp832.500,00
16.	02 April 2022	Sosial	Partisipasi 30 snack untuk acara buka puasa 1 ramadhan	Masjid Fuad Akbar	Rp210.000,00
17.	09 April 2022	Sosial	Partisipasi 10 nasi box	Masjid Al Maksum Desa Bajing	Rp150.000,00
18.	11 April 2022	Sosial	Bantuan sarung untuk	Kecamatan	Rp3.358.500,00

			amaliyah ramadhan	Cilacap Selatan	
19.	18 April 2022	Sosial	Bantuan penerimaan siswa didik baru	MI Maarif NU 1 Panusupan	Rp300.000,00
20.	22 April 2022	Sosial	Bantuan 3 pcs sarung	Panti asuhan muhammadiyah ajibarang	Rp400.000,00
21.	17 Mei 2022	Sosial	Partisipasi doorprize untuk acara HUT ke 30 th	SMP N 2 Jeruklegi	Rp430.000,00
22.	19 Mei 2022	Sosial	Bantuan kegiatan sekolah	SMK N 1 Purwojati	Rp500.000,00
23.	23 Mei 2022	Sosial	Bantuan untuk acara HUT	SMP N 5 Kroya	Rp500.000,00
24.	25 Mei 2022	Sosial	Bantuan kegiatan perpisahan penilik	PAUD Korwilcam dindik banyumas	Rp400.000,00
25.	31 Mei 2022	Sosial	Bakti sosial & bersih-bersih ralam rangka HUT BGS ke 53 th	Masjid sekitas BGS	Rp7.207.800,00
26.	23 Juni 2022	Sosial	Partisipasi doorprize dalam rangka HUT Bhayangkara ke 76 th	Polres Purworejo	Rp4.618.000,00
27.	28 Juli 2022	Sosial	Bantuan acara peringatan HUT RI ke 77 th	Kecamatan Nuwasungu	Rp500.000,00
28.	04 Agustus 2022	Sosial	Bantuan doorprize HUT RI ke 77 th	MI Klapagading	Rp672.500,00
29.	09 Agustus 2022	Sosial	Bantuan HUT RI ke 77 th (doorprize)	KPH Banyumas Barat	Rp1.455.000,00
30.	13 Agustus 2022	Sosial	Bantuan sepeda untuk acara peringatan HUT RI ke 77 th	SMK Karya Teknologi 2 Jatilawang	Rp1.350.000,00
31.	13 Agustus 2022	Sosial	Bantuan 2 buah setrika, 1 bh kipas angin cosmos untuk acara peringatan HUT RI ke 77 th	SMK Wijayakusuma Jatilawang	Rp590.000,00
32.	30 Agustus 2022	Sosial	Bantuan kompor untuk acara semarak 17an	Desa Klapagading	Rp295.000,00
33.	13 September 2022	Sosial	Partisipasi acara contest coffe	Hotel Azana Asia	Rp1.000.000,00
34.	19 September 2022	Sosial	Partisipasi stand fan & dispenser untuk kegiatan sepeda santai	KSOP Cilacap	Rp350.000,00
35.	26 September 2022	Sosial	Partisipasi dalam rangka operasi lilin candi & tahun baru	POLDA JATENG	Rp2.500.000,00

			2023		
36.	29 September 2022	Sosial	Partisipasi doorprize untuk kegiatan senam hari agraria	BPN Cilacap	Rp945.000,00
37.	10 Oktober 2022	Sosial	Partisipasi Komunitas sepeda cilacap junior	Komunitas sepeda cilacap junior	Rp1.500.000,00
38.	22 Oktober 2022	Sosial	Partisipasi spanduk futsal, mapsi,dll	MA Maarif Kebasen	Rp552.500,00
39.	09 November 2022	Sosial	Partisipasi HUT ke 38 th	SMA N 1 Jatilawang	Rp3.000.000,00
40.	10 November 2022	Sosial	Partisipasi sovenir jam dinding untuk acara HUT ke 77 th	BRIMOB Purwokerto	Rp1.350.000,00
41.	22 November 2022	Sosial	Bantuan dalam rangka memperingati hari kesehatan nasional	Dinas Puskesmas Ajibarang 1	Rp800.000,00
42.	29 Desember 2022	Sosial	Suport HUT PGRI	PGRI	Rp480.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

BAB III
HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	PT BPR Gunung Slamet
Alamat	:	Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
Nomor Telepon	:	0282532871
Posisi Laporan	:	Desember 2022
Modal Inti	:	Rp177.874.957.461,00
Total Aset	:	Rp851.073.868.171,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Gunung Slamet Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)

b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.49	0.298
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.41	0.212
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2.60	0.065
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.60	0.360
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.34	0.234
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.91	0.291
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.55	0.191
10	Rencana Bisnis BPR	2.10	0.158
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.70	0.128
Nilai Komposit			**2.200**
Predikat Komposit			**Baik**

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.49)

a) BPR telah memiliki 3 orang anggota Direksi yaitu 1 orang Direktur Utama, 1 orang Direktur Operasional dan 1 orang Direktur Kepatuhan sesuai dengan POJK No 4 tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR
b) Seluruh Direksi bertempat tinggal di Kota Cilacap
c) Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi serta tidak ada rangkap jabatan.
d) Direksi telah menyampaikan penerapan Tata Kelola kepada OJK, PERBARINDO, dan media BPR
e) Direksi telah memiliki & melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
f) Seluruh Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan.
g) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, untuk Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.41)

a) Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang terdiri dari 1 orang Komisaris Utama, 1 orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris dan BPR rencana ke depan akan menambahkan jumlah anggota Komisaris Independen.
b) Seluruh Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kab. CIlacap
c) Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi namun belum tertuang secara tertulis dengan baik.
d) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris merujuk pada pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris
e) Rapat Dewan Komisaris beserta agendanya, telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dan tertuang dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik.
f) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 2.6)

a) Sesuai dengan POJK NO 4 tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola, PT BPR Gunung Slamet telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
b) Komite Pemantau Risiko belum melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko karena SKMR dan SKK masih terdapat rangkap jabatan yang menimbulkan tumpang tindih jobdesk.
c) Komite Audit belum sepenuhnya melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3.6)

a) BPR telah memiliki SOP benturan kepentingan, namun belum dilakukan pengkinian secara berkala
b) Selama tahun 2022 terdapat benturan kepentingan yang dapat
mengurangi keuntungan BPR

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.34)

a) PT BPR Gunung Slamet telah memiliki 1 orang Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan.
b) Direksi telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, namun masih terdapat rangkap jabatan sehingga masih ada tumpang tindih terhadap jobdesk serta belum terlaksana dengan baik fungsi tersebut.
c) Dalam pelaksanaan tugasnya, SKK telah memiliki SOP Fungsi Kepatuhan
d) Dalam penerapan fungsi kepatuhan, BPR telah dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, serta akan lebih menumbuhkan dan meningkatkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi
e) Direktur kepatuhan belum menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala triwulan kepada Dewan Komisaris.
f) Direksi telah mengangkat PE Kepatuhan dan Manajamen Risiko & membentuk Komite Manajemen Risiko
g) Untuk meminimalisir setiap penyelewengan yang akan timbul, Direksi membudayakan dengan sosialisasi & pelatihan tentang seluruh kebijakan, ketentuan, sistem & prosedur yang berlaku saat ini sesuai dengan POJK & Perundang-undangan yang lainnya

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

a) PT BPR Gunung Slamet telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yangbertanggung jawab kepada Direktur Utama.
b) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan hasil audit intern & hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK.
c) SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, namun belum dilakukan pengkinian
d) SKAI menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

a) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah terdaftar di OJK dan telah mendapatkan persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.
b) BPR telah menyampaikan laporan hasil audit ekstern kepada OJK
c) Hasil audit dan Management Letter dari KAP telah disampaikan secara tepat waktu kepada PT BPR Gunung Slamet

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.91)

a) BPR telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) namun merangkap dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
b) BPR telah memiliki SOP Penerapan Manajemen Risiko yang belum dilakukan pengkinian
c) BPR telah menyusun dan melaporkan laporan profil risiko kepada OJK
d) Kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko sudah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
e) Bank telah menerapkan 6 (enam) jenis risiko sesuai dengan Modal Inti BPR
f) Bank menyusun laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.55)

a) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring

dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
b) Laporan BMPK dilakukan secara berkala, benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK
c) Laporan & proses pemberian kredit besar oleh BPR belum seluruhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.1)

a) RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
b) Penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2022, berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/ POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR, dimana dalam penyusunannya telah mencakup rencana bisnis BPR jangka pendek, menengah dan panjang.
c) Penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2022 dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas pebankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta penerapan manajemen risiko
d) Pelaksanaan RBB diawasi oleh Dewan Komisaris.
e) RBB telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.7)

a) PT BPR Gunung Slamet telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan OJK
b) BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK
c) Pelaporan keuangan kepada otoritas telah dilaksanakan tepat waktu
d) Laporan penanganan & penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Sesuai dengan ketentuan Regulasi, yaitu POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka kesimpulan umum atas self asssesment yang telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian Tata Kelola dengan perolehan nilai komposit 2,2 dan peringkat Baik. Mencerminkan bahwa manajemen bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidaklah signifikan dan dapat diselesaikan secara bertahap dengan tindakan normal oleh manajemen bank. Kelemahan-kerlemahan yang dijumpai oleh penerapan Tata Kelola di PT BPR Gunung Slamet sampai dengan Desember 2022 dalam pelaksanaannya baik mencakup struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata kelola dapat diselesaikan secara bertahap dan sesuai ketentuan yang berlaku oleh manajemen bank. Bank terus berusaha semakin meningkatkan penerapan Tata Kelola perusahaan ke arah yang semakin baik lagi dan senantiasa melakukan pemenuhan komitmen bank kepada regulator.

Cilacap, 19 Januari 2023

PT BPR Gunung Slamet

Disetujui Oleh,	Disetujui oleh,
Sentot Sujiono	**Irawan Jayasaputra**
Komisaris Utama	Direktur Utama

Cilacap, 19 Januari 2023

PT BPR Gunung Slamet

Disetujui Oleh,

Sentot Sujiono
Komisaris Utama

Disetujui oleh,

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG SLAMET CILACAP

Irawan Jayasaputra
Direktur Utama

PT BPR Gunung Slamet
Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
Telepon: 0282532871
Website: www.bprgunungslamet.com. Email: bgsclp_31@yahoo.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR Gunung Slamet Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Slamet selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Cilacap, 19 Januari 2023

PT BPR Gunung Slamet

Disetujui Oleh,	**Disetujui oleh,**
Sentot Sujiono	**Irawan Jayasaputra**
Komisaris Utama	Direktur Utama